

JURNAL KOMPILEK

Jurnal Kompilasi Ilmu Ekonomi

<i>Aris Sunandes</i>	ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENDORONG KEPUTUSAN UNTUK MENGIKUTI PROGRAM ASURANSI DI KOTA BLITAR
<i>Sulistya Dewi W.</i>	PENGARUH VARIABEL-VARIABEL YANG MERUBAH STRUKTUR MODAL PADA PERUSAHAAN MAKANAN DAN MINUMAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA
<i>Siti Sunrowiyati</i>	PENERAPAN METODE AKUNTANSI PERSEDIAAN SERTA PENGARUHNYA TERHADAP NERACA DAN LAPORAN LABA RUGI
<i>Retno Murni Sari</i>	PENGARUH KOMITMEN KARYAWAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN TULUNGAGUNG TERHADAP PRESTASI KERJA
<i>Sandi Eka S.</i>	PENGARUH KARAKTERISTIK PRODUK TERHADAP KEPUASAN DAN LOYALITAS PENGUNJUNG PADA PERPUSTAKAAN PROKLAMATOR BUNG KARNO KOTA BLITAR
<i>Sumini</i>	PERSEPSI PENILAIAN KONSUMEN TERHADAP MEREK ROKOK RENDAH TAR DAN RENDAH NIKOTIN
<i>Iwan Setya Putra</i>	EVALUASI PENERAPAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PADA SISTEM DAN PROSEDUR BELANJA DI PEMERINTAH KOTA BLITAR

[Vol 3, No. 1]

Hal. 1 - 91

Juni 2011

ISSN 2088-6268

Diterbitkan oleh:
**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT (LPPM)
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI KESUMA NEGARA BLITAR
Jl. Mastrip 59 Blitar 66111, Telp./Fax : (0342) 802330/813779
Email : info@stieken.ac.id**

[STIE KESUMA NEGARA BLITAR]

JURNAL KOMPILEK

Jurnal Kompilasi Ilmu Ekonomi

Daftar Isi:

<i>Aris Sunandes</i>	ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENDORONG KEPUTUSAN UNTUK MENGIKUTI PROGRAM ASURANSI DI KOTA BLITAR (Hal. 1 - 13)
<i>Sulistya Dewi W.</i>	PENGARUH VARIABEL-VARIABEL YANG MERUBAH STRUKTUR MODAL PADA PERUSAHAAN MAKANAN DAN MINUMAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (Hal. 14 - 31)
<i>Siti Sunrowiyati</i>	PENERAPAN METODE AKUNTANSI PERSEDIAAN SERTA PENGARUHNYA TERHADAP NERACA DAN LAPORAN LABA RUGI (Hal. 32 - 39)
<i>Retno Murni Sari</i>	PENGARUH KOMITMEN KARYAWAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN TULUNGAGUNG TERHADAP PRESTASI KERJA (Hal. 40 - 48)
<i>Sandi Eka S.</i>	PENGARUH KARAKTERISTIK PRODUK TERHADAP KEPUASAN DAN LOYALITAS PENGUNJUNG PADA PERPUSTAKAAN PROKLAMATOR BUNG KARNO KOTA BLITAR (Hal. 49 - 57)
<i>Sumini</i>	PERSEPSI PENILAIAN KONSUMEN TERHADAP MEREK ROKOK RENDAH TAR DAN RENDAH NIKOTIN (Hal. 58 - 67)
<i>Iwan Setya Putra</i>	EVALUASI PENERAPAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PADA SISTEM DAN PROSEDUR BELANJA DI PEMERINTAH KOTA BLITAR (Hal. 68 - 91)

EVALUASI PENERAPAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PADA SISTEM DAN PROSEDUR BELANJA DI PEMERINTAH KOTA BLITAR

Iwan Setya Putra

ABSTRAKSI : Semua Pemerintah Daerah diwajibkan menjalankan *good governance* dalam setiap aktivitas pelayanan publik, termasuk pengelolaan keuangan daerah. Dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban tersebut, salah satu cara yang ditempuh Pemerintah Kota Blitar adalah menggunakan suatu sistem aplikasi yang disebut Sistem Informasi Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (SIP APBD) yaitu suatu sistem informasi akuntansi yang ditujukan untuk membantu pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerahnya. Dari pengujian melalui kuesioner kepada 20 responden di Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Blitar tersebut diperoleh hasil bahwa variabel kualitas efektivitas sistem, kualitas efisiensi sistem dan penerapan SIP APBD telah mencapai level kematangan level 4 (*managed and measurable*). Berarti tanggung jawab pengelolaan TI secara jelas telah ditentukan, dikelola dan diselenggarakan. Pemerintah dapat mengukur dan memonitor prosedur yang ada sehingga mudah ditanggulangi jika terjadi penyimpangan. Otomasi dan perangkat teknologi informasi yang digunakan juga telah memenuhi kebutuhan. Kemudian dari Uji Simultan dengan F-Test, maka diperoleh hasil bahwa variabel kualitas efektivitas sistem dan kualitas efisiensi sistem secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kualitas penerapan SIP APBD. sehingga apabila variabel kualitas efektivitas sistem dan kualitas efisiensi sistem meningkat maka akan semakin meningkat pula kualitas penerapan SIP APBD, begitu pula sebaliknya. Dan hasil dari Uji t (parsial) dengan T-test kualitas efektivitas sistem dan kualitas efisiensi sistem secara individual (parsial) berpengaruh signifikan terhadap kualitas penerapan SIP APBD.

Kata Kunci : *efektifitas, efisiensi, sistem informasi penyusunan APBD*

A. Pendahuluan

Pemerintah daerah diharuskan untuk selalu melakukan peningkatan kualitas dan kuantitas pembangunan daerah yang bersifat transparansi, partisipasi dan akuntabilitas dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Partisipasi maksudnya mengikutsertakan keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Sedangkan akuntabilitas adalah pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan.

Untuk mewujudkan *good governance* diperlukan perubahan paradigma pemerintahan yang mendasar dari sistem lama yang serba sentralistik dimana pemerintah pusat sangat kuat dalam menentukan kebijakan. Hal ini diwujudkan dengan melaksanakan penyelenggaraan pemerintah di daerah dalam bentuk otonomi daerah yang mengacu pada Undang-undang no 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Tiga paket perundang-undangan dibidang keuangan negara yang menjadi landasan hukum bagi reformasi di bidang keuangan negara sebagai upaya untuk mewujudkan *good governance* yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, serta Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengawasan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara yang memayungi pengelolaan keuangan negara maupun keuangan daerah.

Seiring dengan reformasi di bidang keuangan negara, maka perlu dilakukan perubahan-perubahan di berbagai bidang untuk mendukung agar reformasi di bidang keuangan negara dapat berjalan dengan baik. Salah satu perubahan yang signifikan adalah perubahan di bidang akuntansi pemerintahan karena melalui proses akuntansi dihasilkan informasi keuangan yang tersedia bagi berbagai pihak untuk digunakan sesuai dengan tujuan masing-masing. Informasi akuntansi bermanfaat untuk pengambilan keputusan, terutama untuk membantu pimpinan dalam melakukan alokasi sumber daya. Informasi akuntansi dapat digunakan untuk menentukan suatu biaya program, proyek atau aktifitas serta kelayakannya baik secara ekonomis maupun teknis. Dengan informasi akuntansi, pemerintah dapat menentukan biaya

pelayanan yang diberikan kepada publik, menetapkan biaya standar, dan harga yang akan dibebankan kepada publik atas suatu pelayanan. Informasi akuntansi dapat pula digunakan untuk membantu dalam pemilihan program yang efektif dan ekonomis dan tepat sasaran. Serta digunakan untuk menentukan indikator kinerja sebagai dasar penilaian kinerja.

B. Permasalahan

Pelaksanaan penggunaan dana belanja oleh pemerintah daerah, memerlukan beberapa tahap yang harus disiapkan oleh para pejabat pelaksana anggaran daerah dalam periode waktu tertentu, tahapan yang dilakukan dalam proses pencairan dana belanja tersebut sangatlah banyak. Sehingga keberadaan sistem informasi dan teknologi yang mendukungnya sangatlah diperlukan. Melihat pentingnya peranan teknologi informasi tersebut, maka harus ada suatu mekanisme yang dapat mengukur kinerja perangkat teknologi tersebut. Salah satu cara atau metode yang dapat dipakai adalah dengan melakukan pengujian apakah sudah dilaksanakan dengan efektif dan efisien sesuai dengan rencana yang tertuang pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD), tanpa adanya keterlambatan sehingga sasaran dapat dicapai secara tepat guna dan berhasil guna.

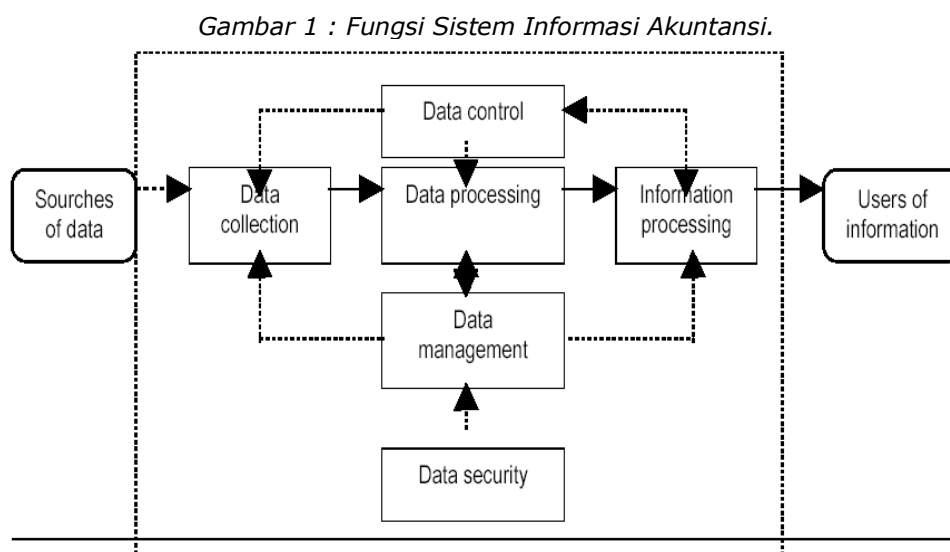
C. Hasil Penelitian Terdahulu

Setiawan (2010:iv) dalam penelitiannya berjudul Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Dalam Mengendalikan Program Pembangunan Daerah Melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Yang Efektif (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Blitar), menyebutkan bahwa SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Daerah) pada DPKAD ditinjau dari segi arsitektural tidak berpengaruh secara signifikan terhadap efektivitas, namun dari segi implementasi SIMDA berpengaruh secara signifikan terhadap efektivitas sehingga apabila kualitas implementasi ditingkatkan maka SIMDA akan berjalan dengan lebih efektif. Dalam kualitas implementasi mencakup data masukan original, informasi yang dihasilkan selalu *up to date*, tersedianya aplikasi pendukung termasuk untuk pemeliharaan, didukung oleh jaringan komputer, dan kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) yang terlibat dalam SIMDA. Kemudian peneliti juga menyarankan agar sosialisasi dan pelatihan aplikasi SIMDA perlu lebih ditingkatkan lagi.

D. Tinjauan Pustaka

1. Fungsi Sistem Informasi Akuntansi

Setiap sistem informasi akuntansi melaksanakan lima fungsi utama, yaitu pengumpulan data, pemrosesan data, manajemen data, pengendalian data (termasuk security), dan penghasil informasi. Gambar 1 menunjukkan hubungan fungsi tersebut.



Dikutip dari "Report of The Committee on Accounting and Information System," in Committee Reports: Supplement to Vol. XLVI of the Accounting Review (Evenston, III: American Accounting Association, 1971, p.290)

Setiap fungsi terdiri atas beberapa langkah dan urutan langkah tersebut membentuk suatu prosedur.

1) Pengumpulan Data

Fungsi pengumpulan data terdiri atas memasukkan data transaksi melalui formulir, mensyahkan serta memeriksa data untuk memastikan ketepatan dan kelengkapannya. Jika data bersifat kuantitatif, data dihitung dahulu sebelum dicatat. Jika data jauh dari lokasi pemrosesan, maka data harus ditransmisikan lebih dahulu.

2) Pemrosesan Data

Pemrosesan data terdiri atas proses pengubahan *input* menjadi *output*. Fungsi pemrosesan data terdiri atas langkah-langkah sebagai berikut:

- a) Pengklasifikasian atau menetapkan data berdasar kategori yang telah ditetapkan.
- b) Menyalin data ke dokumen atau media lain.
- c) Mengurutkan, atau menyusun data menurut karaktersitiknya.
- d) Mengelompokkan atau mengumpulkan transaksi sejenis.
- e) Menggabungkan atau mengkombinasikan dua atau lebih data atau arsip.
- f) Melakukan penghitungan.
- g) Peringkasan, atau penjumlahan data kuantitatif.
- h) Membandingkan data untuk mendapatkan persamaan atau perbedaan yang ada.

3) Manajemen Data

Fungsi manajemen data terdiri atas tiga tahap, yaitu: penyimpanan, pemutakhiran dan pemunculan kembali (*retrieving*). Tahap penyimpanan merupakan penempatan data dalam penyimpanan atau basis data yang disebut arsip. Pada tahap pemutakhiran, data yang tersimpan diperbaharui dan disesuaikan dengan peristiwa terbaru. Kemudian pada tahap *retrieving*, data yang tersimpan diakses dan diringkas kembali untuk diproses lebih lanjut atau untuk keperluan pembuatan laporan.

Manajemen data akan menunjang pencapaian efisiensi aktivitas dalam proses menghasilkan informasi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen terutama mengenai informasi aktivitas dan informasi kebijakan manajemen.

a) Pengendalian Data

Fungsi pengendalian data mempunyai dua tujuan dasar:

- (1) Untuk menjaga dan menjamin keamanan aset perusahaan, termasuk data
- (2) Untuk menjamin bahwa data yang diperoleh akurat dan lengkap serta diproses dengan benar. Berbagai teknik dan prosedur dapat dipakai untuk menyelenggarakan pengendalian dan keamanan yang memadai.

b) Penghasil Informasi

Fungsi penghasil informasi ini terdiri atas tahapan pemrosesan informasi seperti penginterpretasian, pelaporan dan pengkomunikasian informasi

2. Akuntansi Pemerintahan, Anggaran Dan Belanja

a. Pengertian Akuntansi Pemerintahan

Lembaga pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya memerlukan jasa akuntansi, baik analisis maupun untuk meningkatkan mutu pengawasan, pendidikan, dan pengelolaan keuangan untuk menghasilkan informasi yang akan digunakan. Akuntansi demikian dikenal dengan akuntansi pemerintahan. Untuk dapat memahami pengertian yang lebih jelas mengenai Akuntansi Pemerintahan, di sini penulis mengemukakan beberapa definisi dari para ahli.

Menurut Arif (2009:11) akuntansi pemerintahan adalah sebagai aktivitas pemberian jasa (*service activity*) untuk menyediakan informasi keuangan kepada para pengguna dalam rangkapengambilan keputusan. Untuk aktivitas tersebut, dilakukan proses pencatatan, pengklasifikasian, dan pengikhtisaran transaksi keuangan yang timbul dari kegiatan organisasi untuk menghasilkan informasi keuangan berupa posisi keuangan pada

waktu tertentu, hasil kegiatan untuk periode yang berakhir pada waktu tertentu, disertai dengan penafsiran atas informasi keuangan tersebut.

b. Pengertian Anggaran

Definisi anggaran menurut Peraturan Pemerintah No 24 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan No 1 adalah "pedoman tindakan yang akan dilaksanakan pemerintah meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah, yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode".

Anggaran di Indonesia diwujudkan dalam APBN dan APBD setiap tahun. Anggaran tersebut disampaikan pemerintah masing-masing kepada lembaga perwakilan/legislatif untuk dibahas dan disetujui.

c. Belanja

1) Pengertian Belanja

Definisi belanja menurut PP No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Definisi lain dari belanja ini adalah seperti yang dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

Konsep anggaran berbasis kinerja menghendaki adanya keterkaitan antara output/hasil dari suatu program/kegiatan dikaitkan dengan input yang digunakan. Dalam bahasa keuangan input tersebut tercermin dari belanja yang dikeluarkan untuk membiayai suatu program ataupun kegiatan. Oleh karena itu untuk tujuan dimaksud dalam Permendagri No. 13 Tahun 2006 terdapat pengelompokan Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung.

Untuk lebih jelasnya masing-masing belanja dapat diuraikan sebagai berikut:

a) Belanja tidak langsung

Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan program dan kegiatan.

Kelompok belanja tidak langsung dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari :

- (1) Belanja pegawai
- (2) Bunga
- (3) Subsidi
- (4) Hibah
- (5) Bantuan sosial
- (6) Belanja bagi hasil
- (7) Bantuan keuangan
- (8) Belanja tidak terduga

b) Belanja langsung

Belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan program dan kegiatan.

Kelompok belanja langsung dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari :

- (1) Belanja pegawai
Digunakan untuk pengeluaran honorarium / upah dalam melaksanakan program dan kegiatan
- (2) Belanja barang dan jasa
Digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah
- (3) Belanja modal
Digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan

d. Sistem Akuntansi Pemerintahan

Di dalam sistem akuntansi pemerintah baik pusat maupun daerah, komponen sistem yang diatur meliputi antara lain, formulir, prosedur-prosedur, catatan-catatan, dan laporan yang dihasilkan. Di dalam penyelenggaraan suatu sistem akuntansi, unit organisasi yang melaksanakan juga diatur. Unit organisasi tersebut akan menggunakan formulir dan catatan untuk melaksanakan prosedur untuk menghasilkan laporan keuangan. Selain itu, di dalam prosedur juga diatur mengenai pokok pengendalian intern yang menjamin keamanan aset, efisiensi dan efektifitas pengelolaan, keandalan suatu laporan keuangan, dan ketaatan terhadap undang-undang.

1) Formulir

Formulir merupakan dokumen yang dirancang, ditetapkan dan diselenggarakan untuk suatu transaksi. Formulir yang diatur diantaranya terkait dengan bukti penerimaan, bukti pengeluaran, bukti pencatatan aset.

2) Organisasi

Unit penyelenggara prosedur untuk membukukan transaksi. Unit organisasi tersebut bisa berjenjang dari tingkat yang paling bawah atau tersentralisasi

3) Prosedur dan pengendalian intern

Prosedur meliputi langkah-langkah yang dilakukan unit organisasi untuk membukukan transaksi. Prosedur yang diatur terkait dengan pendapatan, belanja, pembiayaan, aset dan kewajiban. Pengendalian intern terkait dengan prosedur yang harus dapat menjamin terpenuhinya tujuan pengendalian. Misalnya pemisahan fungsi pembukuan, pembayaran dan penerimaan barang.

4) Catatan

Catatan merupakan dokumen akuntansi yang diselenggarakan antara lain berupa buku jurnal, buku besar dan buku besar pembantu.

5) Laporan

Laporan yang dihasilkan berupa laporan keuangan, yang terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan.

e. Sistem Informasi Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

Sistem Informasi Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (SIP APBD) adalah suatu program aplikasi yang ditujukan untuk membantu pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerahnya. Dengan aplikasi ini, Pemerintah daerah dapat melaksanakan pengelolaan keuangan daerahnya secara terintegrasi, dimulai dari penganggaran, penatausahaan, akuntansi hingga pelaporannya.

3. Kualitas Sistem Informasi (Efektivitas Dan Efisiensi)

Efektivitas menurut Sanyoto (2007:159) efektivitas (*doing the right things*) artinya sistem informasi tersebut dapat memenuhi kebutuhan para penggunanya. Ketersediaan sistem informasi harus dirasakan manfaatnya sebagai penyedia informasi untuk bahan dalam proses pengambilan keputusan maupun dukungan operasional organisasi tersebut.

Efisiensi menurut Sanyoto (2007:159) efisiensi (*doing the thing right*) artinya dengan sumberdaya informasi tertentu dapat menghasilkan output semaksimal mungkin. Yaitu dengan konfigurasi mesin seminimal mungkin dapat memenuhi kebutuhan pemakai jasa semaksimal mungkin

4. Metode COBIT (*Control Objectives for Information and Related Technology*)

Menurut Sanyoto (2007:276) Cobit adalah sekumpulan dokumentasi *best practices* untuk tata kelola teknologi informasi (*IT governance*) yang dapat membantu auditor, pengguna (user) dan manajemen untuk menjembatani gap antara resiko bisnis, kebutuhan kontrol dan masalah-masalah teknis *information technology* (IT). COBIT disusun oleh the IT Governance Institute (ITGI) dan Information Systems Audit and Control Association (ISACA) pada tahun 1992. COBIT merupakan salah satu metode yang memberikan kerangka dasar dalam menciptakan sebuah teknologi informasi yang sesuai dengan organisasi dengan tetap memperhatikan faktor-

faktor lain yang berpengaruh. Sebagai model untuk organisasi sistem informasi, kerangka kerja Cobit merupakan kumpulan *best practice* dan bersifat generik. Oleh karena itu dalam menerapkan kerangka kerja Cobit harus disesuaikan kebutuhan pengelolaan dan proses teknologi informasi yang berlangsung dalam organisasi tersebut .

Panduan yang terdapat dalam kerangka kerja Cobit mencakup tujuan pengendalian yang terdiri dari 4 domain, yaitu:

- a. Perencanaan dan Organisasi (*Planning and Organization*)
Mencakup strategi dan taktik yang menyangkut identifikasi tentang bagaimana sistem informasi/teknologi informasi dapat memberikan kontribusi terbaik dalam pencapaian tujuan organisasi sehingga terbentuk sebuah organisasi yang baik dengan infrastruktur teknologi yang baik pula
- b. Perolehan dan Implementasi (*Acquisition and Implementation*)
Identifikasi solusi dan kemudian diimplementasikan dan diintegrasikan dalam proses bisnis untuk mewujudkan strategi teknologi informasi
- c. Penyerahan dan Pendukung (*Delivery and Support*)
Berhubungan dengan penyampaian layanan yang diinginkan, yang terdiri dari operasi pada sistem keamanan dan aspek kesinambungan bisnis sampai dengan pengadaan training
- d. Monitoring
Semua proses sistem informasi/informasi teknologi dinilai secara teratur dan berkala bagaimana kualitas dan kesesuaiannya dengan kebutuhan kontrol.

Usulan kerangka kerja Cobit yang dibuat dapat digunakan khusus untuk menilai proses penyampaian dukungan pelayanan informasi dalam sebuah organisasi. Penilaian tersebut dilakukan melalui kendali dan indikator kinerja yang merupakan hasil ekstraksi dari Cobit. Berdasarkan model tersebut, sebuah kuesioner akan dibentuk untuk mengidentifikasi tingkat kematangan (*maturity*) sebuah sistem informasi.

Menurut Sarno(2009:97), level tingkat kematangan (*maturity*) yang akan dijadikan tolak ukur untuk mengontrol proses-proses sistem informasi/teknologi informasi menggunakan metode penilaian (*scoring*) sehingga suatu organisasi dapat menilai proses-proses sistem informasi/teknologi informasi yang dimilikinya dengan melihat skala sebagai berikut :

- 1) Skala non-existent (nilai 0 – 0,50) , yaitu tidak adanya prosedur sistem informasi yang diterapkan dalam sebuah organisasi. Tanggung jawab belum ditentukan.
- 2) Skala Initial (nilai 0,51 – 1,50), yaitu tidak adanya prosedur sistem informasi yang diterapkan dalam sebuah organisasi. Kesadaran akan kebutuhan prosedur sistem informasi tergantung pada tiap individu.
- 3) Skala Repeatable (nilai 1,51 – 2,50), yaitu organisasi sudah mulai memiliki prosedur proses teknologi informasi, tetapi tidak ada pelatihan dan komunikasi formal tentang prosedur standar tersebut. Tanggung jawab terhadap proses tersebut masih dibebankan pada individu, tingkat ketergantungan pada kemampuan individu besar.
- 4) Skala Defined Process (nilai 2,51 – 3,50), yaitu prosedur di organisasi sudah distandarisasi, terdokumentasi dan dikomunikasikan melalui pelatihan, tetapi implementasi masih tergantung pada individu apakah mau mengikuti prosedur atau tidak.
- 5) Skala Managed and Measurable (nilai 3,51 – 4,50), yaitu organisasi dapat mengukur dan memonitor prosedur yang ada sehingga mudah ditanggulangi jika terjadi penyimpangan. Proses yang ada sudah berjalan dengan baik dan konstan.

Skala Optimized (nilai 4,51 – 5,00), yaitu proses yang ada sudah mencapai *best practice* melalui proses perbaikan yang terus menerus. Teknologi informasi sudah digunakan terintegrasi untuk otomatisasi proses kerja dalam organisasi, meningkatkan kualitas, efektifitas serta kemampuan beradaptasi terhadap organisasi

5. Hubungan Sistem Informasi Akuntansi Dengan Anggaran Belanja Pemerintah Daerah

Dalam rangka menyediakan informasi yang akurat diperlukan suatu sistem yang bisa digunakan secara bersama-sama antar pejabat pelaksana anggaran daerah untuk memberikan data-data yang diperlukan dalam suatu proses penggunaan anggaran belanja, sehingga data-data ini bisa diolah oleh suatu sistem menjadi informasi yang berguna baik bagi masyarakat maupun bagi pemerintah daerah itu sendiri. Dengan adanya sistem informasi akuntansi, maka pemerintah akan bisa menentukan anggaran pelayanan yang diberikan pada publik, menentukan penganggaran belanja yang akan dibebankan untuk suatu program yang ekonomis dan tepat sasaran. Sistem informasi akuntansi yang efektif, efisien dan aman akan menghasilkan output informasi berupa laporan laporan pertanggungjawaban yang lebih berkualitas. Laporan-laporan tersebut merupakan input yang akan digunakan untuk perencanaan program-program yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran berikutnya.

E. Hipotesis

Berkaitan dengan uji yang akan dilakukan dalam uji regresi yang dilakukan secara simultan dengan F-test dan secara individual (parsial) dengan t-test, maka hipotesis alternatif (H_a) dan H_o) yang digunakan dalam uji regresi linier berganda adalah sebagai berikut.

- H_{a1} : Kualitas efektifitas dan efisiensi sistem informasi akuntansi secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan untuk menunjang kualitas penerapan SIP APBD pada sistem dan prosedur anggaran belanja di Pemerintah Kota Blitar
- H_{a2} : Kualitas efektifitas sistem informasi akuntansi berpengaruh secara signifikan untuk menunjang kualitas penerapan SIP APBD pada sistem dan prosedur anggaran belanja di Pemerintah Kota Blitar.
- H_{a3} : Kualitas efisiensi sistem informasi akuntansi berpengaruh secara signifikan untuk menunjang kualitas penerapan SIP APBD pada sistem dan prosedur anggaran belanja di Pemerintah Kota Blitar
- H_{o1} : Kualitas efektifitas dan efisiensi sistem informasi akuntansi secara bersama-sama tidak berpengaruh secara signifikan untuk menunjang kualitas penerapan SIP APBD pada sistem dan prosedur anggaran belanja di Pemerintah Kota Blitar
- H_{o2} : Kualitas efektifitas sistem informasi akuntansi tidak berpengaruh secara signifikan untuk menunjang kualitas penerapan SIP APBD pada sistem dan prosedur anggaran belanja di Pemerintah Kota Blitar.
- H_{o3} : Kualitas efisiensi sistem informasi akuntansi tidak berpengaruh secara signifikan untuk menunjang kualitas penerapan SIP APBD pada sistem dan prosedur anggaran belanja di Pemerintah Kota Blitar

Pedoman yang digunakan untuk menerima atau menolak hipotesis jika hipotesis alternatif (H_a) yang digunakan:

1. H_a diterima jika $F_{t\text{-hitung}} > F$ atau $t\text{-tabel}$, atau nilai $p\text{ value}$ pada kolom *sig.* < *level of significant* (α)
2. H_a ditolak jika F atau $t\text{-hitung} < F$ atau $t\text{-tabel}$, atau nilai $p\text{ value}$ pada kolom *sig.* > *level of significant* (α)

Pedoman yang digunakan untuk menerima atau menolak hipotesis jika hipotesis nol (H_o) yang digunakan:

1. H_o diterima jika $F_{t\text{-hitung}} < F$ atau $t\text{-tabel}$, atau nilai $p\text{ value}$ pada kolom *sig.* > *level of significant* (α)
2. H_o ditolak jika F atau $t\text{-hitung} > F$ atau $t\text{-tabel}$, atau nilai $p\text{ value}$ pada kolom *sig.* < *level of significant* (α)

F. Metode Pengumpulan Data

Data merupakan salah satu komponen penelitian, artinya tanpa data tidak akan ada penelitian. Data dalam penelitian harus valid atau benar karena jika tidak valid maka akan menghasilkan informasi dan kesimpulan yang keliru atau salah. Oleh sebab itu diperlukan teknik pengambilan data secara benar. Beberapa teknik yang digunakan penulis untuk mengumpulkan data adalah :

1. Observasi
2. Wawancara (*Interview*)
3. Survey Menggunakan Kuisisioner
4. Dokumentasi

G. Variabel Penelitian

1. Pengukuran Variabel Penelitian

Variabel yang diukur dalam penelitian ini adalah variabel kualitas penerapan SIP APBD atas sistem dan prosedur belanja di Kota Blitar. Agar pengumpulan data terarah, dalam hal ini mencakup target bukti yang ingin didapat sekaligus kepada fungsional mana bukti tersebut dapat dicari, maka peneliti perlu membuat tinjauan dengan mengacu pada kerangka kerja tertentu. Kerangka kerja yang dijadikan acuan adalah *Control Objectives for Information and Related Technology* (COBIT). Kerangka kerja tersebut menyediakan obyektif kontrol dan tingkat kedewasaan yang menggambarkan hal-hal yang perlu dipenuhi dalam tiap proses sistem informasi.

2. Indikator Variabel Pengukuran

Indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas penerapan SIP APBD di Pemerintah Kota Blitar antara lain:

- a. Efektivitas (*Effectiveness*), menguraikan informasi yang relevan dan berhubungan dengan proses transaksi yang disampaikan sehingga dapat memenuhi kebutuhan para penggunaannya .
- b. Efisiensi (*Efficiency*), menyangkut ketentuan informasi melalui penggunaan sumberdaya yang optimal (lebih produktif dan ekonomis)

H. Teknik Analisa Data

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data inferensial, yaitu statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan membuat kesimpulan yang berlaku umum. Ciri analisis data inferensial dalam penelitian ini menggunakan rumus statistik tertentu (uji T dan uji F,). Hasil dari perhitungan rumus statistik inilah yang menjadi dasar pembuatan generalisasi dari sampel bagi populasi. Dengan demikian, statistik inferensial berfungsi untuk menggeneralisasikan hasil penelitian sampel bagi populasi.

Kegiatan menganalisis data ini terdiri dari beberapa tahap, yaitu:

1. Tahap persiapan
Pada tahap ini dilakukan beberapa kegiatan antara lain: mengecek nama dan kelengkapan identitas responden, memeriksa isi instrumen pengisian.
2. Tahap tabulasi, yaitu mengelompokkan data ke dalam table frekuensi untuk mempermudah dalam menganalisa. Kegiatan tabulasi dalam hal ini:
 - a. Coding, yaitu pembahasan kode untuk data yang telah diedit
 - b. Skoring, yaitu pemberian skor terhadap jawaban responden untuk memperoleh data yang diperlukan.
3. Tahap penerapan data
Setelah melalui tahap tabulasi, dimana variabel-variabel penelitian telah dikelompokkan, maka dilakukan pengujian-pengujian tingkat level kematangan, pengujian linear berganda baik uji t-test maupun F-test. sehingga bisa digunakan untuk dasar penentuan level kematangan (*maturity*) dan menentukan apakah kualitas efektivitas sistem dan kualitas efisiensi sistem berpengaruh secara signifikan untuk menunjang kualitas penerapan SIP APBD di Pemerintah Kota Blitar.

Memberikan kesimpulan akhir terhadap hasil penelitian dan menampilkan alternatif pemecahan yang baik

I. Hasil Analisa data

1. Metode Analisa Data Kuantitatif

Jenis kuesioner *Cobit* memberikan kebebasan kepada peneliti untuk membuat pilihan jawaban pada kuesionernya. Untuk mengubah data-data kualitatif hasil kuesioner dari responden ke dalam bentuk kuantitatif, penulis telah membuat daftar skala pengukuran nilai pilihan jawaban pada kuesioner tersebut dan berikut uraiannya:

Tabel 1: Tabel skala pengukuran nilai jawaban

NILAI JAWABAN				
Nilai 5	Nilai 4	Nilai 3	Nilai 2	Nilai 1
Sangat bermanfaat	Bermanfaat	Mungkin	Kurang	Tidak
Sangat perlu	Perlu	Mungkin	Kurang	Tidak
Sangat baik	Baik	Mungkin	Kurang	Tidak
Seluruhnya	Dalam tingkat tertentu	Mungkin	Sedikit	Tidak
Sangat setuju	Setuju	Mungkin	Kurang	Tidak
Sangat mudah	Mudah	Mungkin	Agak Sulit	Sulit
Baik sekali	Baik	Mungkin	Kurang	Tidak
Bisa seluruhnya	Dalam batas tertentu	Mungkin	Sedikit	Tidak
Tepat waktu	Bisa	Mungkin	Kurang	Tidak
Sangat memenuhi	Sudah	Mungkin	Kurang	Belum

Dalam penelitian ini, pengujian-pengujian data yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

1) Uji Tingkat kedewasaan (*Maturity Level*)

Menurut Riyananto (2009:97) menjelaskan bahwa Cobit menyediakan kerangka identifikasi sejauh mana sistem yang diterapkan telah memenuhi standar pengelolaan proses teknologi informasi yang baik melalui penentuan tingkat kedewasaan. Tingkat tersebut memiliki level pengelompokan kapasitas dalam pengelolaan proses teknologi informasi dari level nol (*non-existent*) hingga level lima (*optimized*)

Tabel 2: Representasi Indeks Kematangan

Indek Kematangan	Level Kematangan
0 – 0,50	0 – Non – Existent
0,51 – 1,50	1 – Initial
1,51 – 2,50	2 – Repeatable But Intuitive
2,51 – 3,50	3 – Defined Process
3,51 – 4,50	4 – Managed and Measurable
4,51 – 5,00	5 – Optimized

2) Uji validitas

Uji validitas digunakan untuk mengetahui kelayakan butir-butir dalam suatu daftar pertanyaan dalam mendefinisikan suatu variabel. Daftar pertanyaan ini pada umumnya mendukung suatu kelompok variabel tertentu

3) Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas menunjukkan sejauh mana instrumen penelitian cukup dapat dipercaya digunakan untuk alat mencari data yang diperlukan dalam suatu penelitian.

4) Uji Normalitas

Uji normalitas ini bertujuan untuk mengetahui distribusi data dalam variabel yang akan digunakan dalam penelitian. Data yang baik dan layak digunakan dalam penelitian adalah data yang memiliki distribusi normal.

5) Uji Regresi Linear Berganda

Dalam penelitian ini terdapat satu variabel terikat (Y) yaitu penerapan SIP APBD dan dua variabel bebas (X) yaitu kualitas efektifitas sistem dan kualitas efisiensi sistem.

$$Y = a + b X_1 + bX_2 + e$$

Dimana:

Y = Penerapan SIP APBD

a = Konstanta

b = Koefisien regresi

X1 = Kualitas efektifitas sistem

X2 = Kualitas efisiensi sistem

e = *Standart error*

2. Penerapan Metode

1) Metode pengujian data

a) Uji Tingkat Kedewasaan (*Maturity Level*)

Yang dimaksud istilah tingkat kedewasaan adalah representasi kedewasaan proses teknologi informasi yang berlangsung di Pemerintah Kota Blitar. Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, tingkat kepatutan ditentukan berdasarkan kerangka COBIT yang menyediakan pengelompokan kapasitas suatu lembaga dalam pengelolaan teknologi informasi dari level nol hingga level 5. Hasil pengujian tampak pada tabel 3, 4 dan 5.

Tabel 3: Hasil Pengolahan Kualitas Efektifitas Sistem

Respon den	Pertanyaan										Maturity Aktivitas	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Σ	Mean
1	4	4	5	4	4	5	4	5	4	4	43	4,30
2	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	39	3,90
3	5	3	4	3	3	4	4	5	4	5	40	4,00
4	4	4	4	3	3	4	4	4	5	4	39	3,90
5	2	4	3	5	3	3	3	5	5	5	38	3,80
6	3	3	4	5	4	4	4	4	4	5	40	4,00
7	4	4	2	4	3	4	3	4	4	5	37	3,70
8	3	4	4	4	3	4	4	5	4	5	40	4,00
9	2	3	2	5	2	3	3	4	1	5	30	3,00
10	2	3	3	4	1	2	1	3	4	4	27	2,70
11	3	4	3	3	3	4	3	3	3	4	33	3,30
12	4	5	4	4	4	5	4	5	4	5	44	4,40
13	3	4	3	5	1	2	4	5	4	5	36	3,60
14	4	5	3	4	5	3	4	5	4	5	42	4,20
15	2	3	4	5	1	1	4	5	4	4	33	3,30
16	4	4	3	5	1	2	4	1	3	4	31	3,10
17	3	3	3	4	3	3	3	4	3	5	34	3,40
18	4	4	4	5	4	4	5	5	5	5	45	4,50
19	5	4	4	4	4	3	4	5	4	5	42	4,20
20	5	4	4	4	4	4	3	4	4	5	41	4,10
Σ	70	76	70	84	60	67	72	85	77	93	754	3,77
Maturity Level	3,5	3,8	3,5	4,2	3	3,4	3,6	4,25	3,85	4,65	37,7	3,77

Tabel 4: Hasil Pengolahan Kualitas Efisiensi Sistem

Responden	Pertanyaan						Maturity Aktivitas	
	1	2	3	4	5	6	Σ	Mean
1	4	4	5	4	5	4	26	4,3
2	5	5	4	4	4	5	27	4,5
3	4	4	4	4	5	4	25	4,2
4	2	4	3	1	4	2	16	2,7
5	3	4	4	1	5	3	20	3,3
6	4	3	4	4	5	2	22	3,7
7	3	4	4	4	4	3	22	3,7
8	4	5	5	4	5	4	27	4,5
9	2	4	4	4	4	2	20	3,3
10	4	3	5	5	4	4	25	4,2
11	3	4	4	3	4	3	21	3,5
12	4	4	4	4	5	4	25	4,2
13	4	4	5	4	5	3	25	4,2
14	3	3	4	4	4	4	22	3,7
15	4	4	5	5	5	4	27	4,5
16	2	4	4	2	4	4	20	3,3
17	1	3	5	3	5	3	20	3,3
18	4	4	5	4	5	4	26	4,3
19	4	3	4	3	4	3	21	3,5
20	4	4	3	4	4	4	23	3,8
Σ	68	77	85	71	90	69	460	3,8
Maturity Level	3,4	3,85	4,25	3,55	4,5	3,45	23	3,8

Tabel 5: Hasil Pengolahan Kualitas Penerapan SIP APBD

Responden	Pertanyaan								Maturity Aktivitas	
	1	2	3	4	5	6	7	8	Σ	Mean
1	5	4	5	4	4	4	4	4	34	4,25
2	4	4	4	3	5	4	3	4	31	3,88
3	5	4	5	4	3	5	4	5	35	4,38
4	4	3	4	3	3	4	4	4	29	3,63
5	5	3	5	4	4	4	4	3	32	4,00
6	3	5	3	3	5	4	3	4	30	3,75
7	5	3	3	3	4	4	4	4	30	3,75
8	5	5	5	4	4	3	2	4	32	4,00
9	3	3	3	2	3	5	3	4	26	3,25
10	3	3	3	3	3	4	4	4	27	3,38
11	4	3	4	3	4	3	4	3	28	3,50
12	3	5	3	5	4	5	5	5	35	4,38
13	5	3	5	4	3	4	3	4	31	3,88
14	4	3	4	3	3	4	4	2	27	3,38
15	3	4	3	4	4	4	5	4	31	3,88
16	3	4	3	2	4	4	3	4	27	3,38
17	4	3	3	4	3	3	2	3	25	3,13
18	3	3	3	4	3	2	2	2	22	2,75
19	5	5	5	5	5	5	4	5	39	4,88
20	4	4	4	4	4	4	4	4	32	4,00
Σ	80	74	77	71	75	79	71	76	603	3,77
Maturity Level	4	3,7	3,85	3,55	3,75	3,95	3,55	3,8	30,15	3,77

Cara perhitungan dalam menentukan level kematangan adalah sebagai berikut :

$$\text{Indek Kematangan} = \frac{\sum(\text{Total Jawaban} \times \text{Bobot})}{\text{Jumlah Responden}}$$

Tabel 6: Hasil Uji Tingkat Kedewasaan (Maturity Level)

Aspek yang diuji	Indek Kematangan	Level Kematangan
Kualitas efektivitas sistem	3,77 (3,51 – 4,5)	4 – Managed and Measurable
Kualitas efisiensi sistem	3,8 (3,51 – 4,5)	4 – Managed and Measurable
Penerapan SIP APBD	3,77 (3,51 – 4,5)	4 – Managed and Measurable

b) Uji Validitas

Tahap-tahap melakukan pengujian validitas ini dimulai dengan melakukan penghitungan menggunakan aplikasi *Statistical Product and Service Solutions (SPSS)*. Penghitungan yang dimaksud adalah mencari nilai korelasi dalam hal ini *Corrected Item- Total correlation* yang diperoleh dari menu *Analyze* pilih *Scale* pilih *Reliability analysis*. Validitas suatu butir pertanyaan dapat dilihat pada hasil output SPSS pada tabel yang berjudul *Item-Total correlation*. Suatu butir pernyataan dikatakan valid jika nilai r-hitung yang merupakan nilai dari *Corrected Item- Total correlation* > dari r-tabel pada taraf kepercayaan tertentu.

Menurut Suyuti (2005) bila korelasi tiap factor positif dan besarnya 0,3 ke atas maka faktor tersebut merupakan *construct* yang kuat.

Tabel 7: Tabel Uji Validitas

Variabel	Item	Corrected Item-total correlation	r tabel	Keterangan
Kualitas efektivitas (X1)	Pemisahan tugas (X1.1)	0,519	0,3	Valid
	Pejabat terlatih (X1.2)	0,471	0,3	Valid
	Dokumentasi memadai (X1.3)	0,523	0,3	Valid
	Kontrol fisik harta (X1.4)	-0,282	0,3	Tidak valid
	Deteksi kehilangan data (X1.5)	0,715	0,3	Valid
	Penyajian tepat waktu (X1.6)	0,522	0,3	Valid
	Catak laporan (X1.7)	0,559	0,3	Valid
	Laporan keuangan (X1.8)	0,484	0,3	Valid
	Kebutuhan pelaksana (X1.9)	0,456	0,3	Valid
	Pelatihan rutin (X1.10)	0,328	0,3	Valid
Kualitas efisiensi (X2)	Transmisi (X2.1)	0,605	0,3	Valid
	Fitur lengkap (X2.2)	0,230	0,3	Tidak Valid
	Trusted data(X2.3)	0,410	0,3	Valid
	Mengatasi masalah (X2.4)	0,548	0,3	Valid
	Data up to date (X2.5)	0,307	0,3	Valid
	Dukungan teknis aplikasi (X2.6)	0,548	0,3	Valid
Penerapan SIP APBD (Y)	Sistem keamanan (Y1)	0,360	0,3	Valid
	Penggunaan password (Y2)	0,522	0,3	Valid
	Anti virus (Y3)	0,446	0,3	Valid
	Deteksi pelanggaran (Y4)	0,441	0,3	Valid
	Prosedur hak akses (Y5)	0,384	0,3	Valid
	Tersedia UPS (Y6)	0,494	0,3	Valid
	Perubahan illegal (Y7)	0,321	0,3	Valid
	Data cadangan (Y8)	0,622	0,3	Valid

Berdasarkan hasil uji validitas di atas dari 24 item alat ukur, terdapat 2 item yang tidak valid sehingga item-item tersebut kurang tepat apabila dimasukkan ke dalam instrumen pengukuran. Item- item tersebut tidak valid dikarenakan nilai yang terdapat pada kolom *Corrected Item- Total correlation* kurang dari 0,3 dan ke 2 item tersebut tidak dapat digunakan untuk tahap-

tahap analisis selanjutnya sehingga harus dihilangkan dari daftar. Setelah dihilangkan diuji kembali dan hasilnya sebagai berikut:

Tabel 8: Tabel Uji Validitas Disesuaikan

Variabel	Item	Corrected Item-total correlation	r tabel	Keterangan
Kualitas efektivitas (X1)	Pemisahan tugas (X1.1)	0,519	0,3	Valid
	Pejabat terlatih (X1.2)	0,471	0,3	Valid
	Dokumentasi memadai (X1.3)	0,523	0,3	Valid
	Deteksi kehilangan data (X1.4)	0,715	0,3	Valid
	Penyajian tepat waktu (X1.5)	0,522	0,3	Valid
	Catak laporan (X1.6)	0,559	0,3	Valid
	Laporan keuangan (X1.7)	0,484	0,3	Valid
	Kebutuhan pelaksana (X1.8)	0,456	0,3	Valid
	Pelatihan rutin (X1.9)	0,328	0,3	Valid
Kualitas efisiensi (X2)	Transmisi (X2.1)	0,605	0,3	Valid
	Trusted data(X2.2)	0,410	0,3	Valid
	Mengatasi masalah (X2.3)	0,548	0,3	Valid
	Data up to date (X2.4)	0,307	0,3	Valid
	Dukungan teknis aplikasi (X2.5)	0,548	0,3	Valid
Penerapan SIP APBD (Y)	Sistem keamanan (Y1)	0,360	0,3	Valid
	Penggunaan password (Y2)	0,522	0,3	Valid
	Anti virus (Y3)	0,446	0,3	Valid
	Deteksi pelanggaran (Y4)	0,441	0,3	Valid
	Prosedur hak akses (Y5)	0,384	0,3	Valid
	Tersedia UPS (Y6)	0,494	0,3	Valid
	Perubahan illegal (Y7)	0,321	0,3	Valid
	Data cadangan (Y8)	0,622	0,3	Valid

Pada uji validitas yang telah disesuaikan, semua variabel telah dinyatakan valid dan telah dapat digunakan untuk tahap berikutnya yaitu uji reliabilitas.

c) Uji reliabilitas (keandalan)

Pengujian ini tetap menggunakan aplikasi SPSS dengan masih memilih menu *Analyze* pilih *Scale* pilih *Reliability analysis* dan penghitungan ini dilakukan per variabel namun untuk pengujian reliabilitas nilai diambil dari tabel *reliability statistics* kolom *cronbach's alpha*.

Tabel 9: Tabel uji reliabilitas

Variabel	Cronbach's alpha	Standard Nilai alpha	Keterangan
Kualitas efektifitas sistem (X1)	0,766	0,6	Reliabel
Kualitas efisiensi (X2)	0,706	0,6	Reliabel
Penerapan SIP APBD (Y)	0,750	0,6	Reliabel

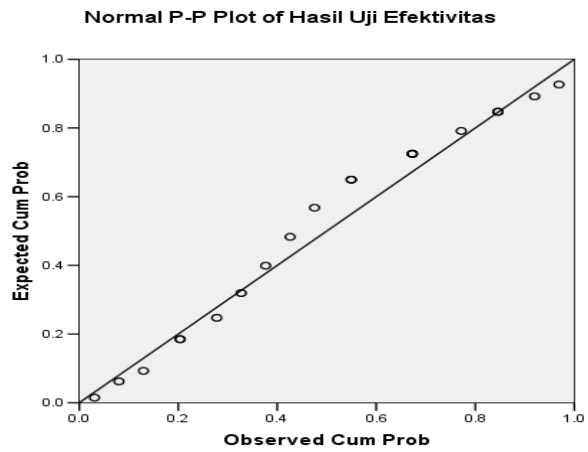
Realibilitas suatu konstruk variabel dikatakan baik jika memiliki nilai Cronbach's alpha > dari 0,60, sehingga dapat ditarik kesimpulan semua variabel yang tersaji pada tabel uji reliabilitas di atas merupakan variabel yang reliabel atau dapat dipercaya.

d) Uji normalitas

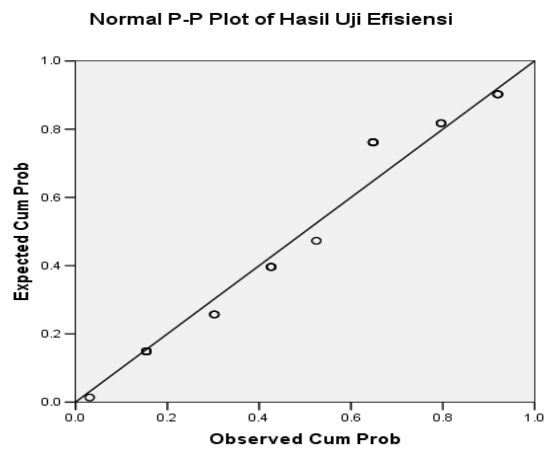
Pengujian normalitas ini juga dilakukan dengan menggunakan aplikasi SPSS dengan memilih menu *analyze* pilih *descriptive statistics* pilih *descriptives* dan *graph normal P-Plot*.

Setelah semua variabel dimasukan dalam menu pengujian normalitas tersebut akan menghasilkan output grafik seperti di bawah ini:

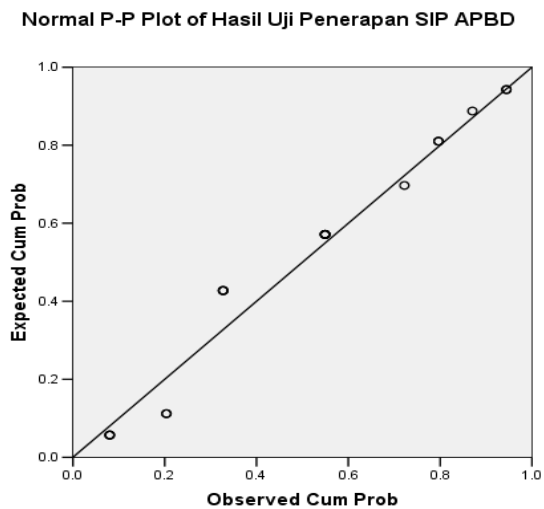
Gambar 2: Grafik uji normalitas variabel kualitas efektivitas sistem (X1)



Gambar 3: Grafik uji normalitas variabel kualitas efisiensi sistem (X2)



Gambar 4: Grafik uji normalitas variabel kualitas penerapan SIP APBD (Y)



Hasil dari output SPSS Normal P-Plot of kualitas efektivitas sistem, kualitas efisiensi sistem dan penerapan SIP APBD memperlihatkan bahwa distribusi dari titik titik data kualitas efektivitas sistem, kualitas efisiensi sistem dan penerapan SIP APBD menyebar di sekitar garis diagonal, dan penyebaran titik-titik data searah dengan garis diagonal. Jadi data pada ketiga variabel tersebut diatas dapat dikatakan normal.

2) Metode analisa data

Setelah semua data teruji kemudian langkah selanjutnya adalah menganalisa data-data tersebut dengan metode analisa regresi linier berganda dengan bantuan aplikasi SPSS dengan memilih menu *analyze, regression, statistics* dan output yang dihasilkan adalah sebagai berikut:

a) Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R^2) bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel independen menjelaskan variabel dependen. Hal ini bisa dilihat pada table *Model Summary*^b dan tertulis *R Square*. Namun untuk regresi linear berganda sebaiknya menggunakan *R square* yang sudah disesuaikan atau tertulis *Adjusted R Square*, karena disesuaikan dengan jumlah variabel independen yang digunakan dalam penelitian. Nilai *R square* dikatakan baik jika di atas 0,5 karena nilai *R Square* berkisar antara 0 sampai 1.

Tabel 10: Model Summary

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,935 ^a	,873	,859	,13461	2,568

a. Predictors: (Constant), Hasil Uji Efisiensi, Hasil Uji Efektivitas

b. Dependent Variable: Hasil Uji Penerapan SIP APBD

Dari Output SPSS di atas memiliki nilai koefisien determinasi yang sudah disesuaikan (*Adjusted R Square*) sebesar 0,859. Artinya 85,9 % variabel dependen penerapan SIP APBD dijelaskan oleh variabel independen kualitas efektivitas sistem dan kualitas efisiensi sistem, dan sisanya 14,1 % (100%-85,9%) dijelaskan oleh variabel lain diluar variabel yang digunakan.

b) Uji Simultan Dengan F-Test

Pengujian ini dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Hasil F-test ini pada output SPSS dapat dilihat pada table ANOVA.

Tabel 11: ANOVA^b

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2,126	2	1,063	58,680	,000 ^a
	Residual	,308	17	,018		
	Total	2,434	19			

a. Predictors: (Constant), Hasil Uji Efisiensi, Hasil Uji Efektivitas

b. Dependent Variable: Hasil Uji Penerapan SIP APBD

Hasil F-test menunjukkan variabel bebas secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel terikat karena *p-value* (pada kolom sig) lebih kecil dari level of significant yang ditentukan, atau *f* hitung (pada kolom F) lebih besar dari *F* tabel. Berdasarkan pada tabel rekapitulasi di atas menunjukkan *f* hitung bernilai 58,680 sedangkan *f* tabel diperoleh nilai 3,467 yang diperoleh dengan bantuan Microsoft excel dengan fungsi =FINV(0.05;2;21) dimana 0,05 merupakan taraf signifikansi, 2 merupakan hasil dari *k*-1 dan 21 merupakan hasil dari *n*-*k* sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa *f* hitung > *f* tabel. Signifikan disini berarti H_0 diterima dan

Ho1 ditolak, artinya variabel kualitas efektivitas sistem (X1) dan kualitas efisiensi sistem (X2) secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap penerapan SIP APBD (Y).

c) Uji t (parsial) dengan T-test

Pengujian ini dimaksudkan untuk mengetahui besarnya pengaruh masing-masing variabel bebas secara individual (parsial) terhadap variabel terikat. Hasil uji pada output SPSS dapat dilihat pada table *Coefficients^a*. Nilai dari uji t-test dapat dilihat dari *p-value* (pada kolom *sig*). pada masing-masing variabel bebas, jika *p-value* lebih kecil dari *level of significant* yang ditentukan, atau t-hitung (pada kolom t) lebih besar dari t-tabel, dihitung dengan bantuan Microsoft excel dengan fungsi =TINV(0.05;16) dimana 0,05 merupakan taraf signifikansi, dan 16 merupakan variable bebas.

Tabel 12: Coefficients^a
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	,661	,317		2,086	,052		
	Hasil Uji Efektivitas	,657	,067	,860	9,868	,000	,981	1,020
	Hasil Uji Efisiensi	,185	,061	,266	3,053	,007	,981	1,020

a. Dependent Variable: Hasil Uji Penerapan SIP APBD

Analisis table Coefficients untuk mengetahui pengaruh variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat sebagai berikut:

- (1) Variabel kualitas efektivitas sistem memiliki nilai p-value 0,000 < 0,05 artinya signifikan, sedangkan t – hitung 9,868 > dari t-table 2,119. artinya signifikan. Signifikan disini berarti Ha2 diterima dan Ho2 ditolak. Artinya kualitas efektivitas sistem secara parsial berpengaruh pada penerapan SIP APBD.
- (2) Variabel kualitas efisiensi sistem memiliki nilai p-value 0,000 < 0,05 artinya signifikan, sedangkan t – hitung 3,053 > dari t-table 2,119 artinya signifikan. Signifikan disini berarti Ha3 diterima dan Ho3 ditolak. Artinya kualitas efisiensi sistem secara parsial berpengaruh pada penerapan SIP APBD.

Tabel 13: Tabel rekapitulasi analisa data

Variabel	B	t hitung	t tabel	Keterangan
Konstanta	0,661	2,086		-
Kualitas efektivitas sistem (X1)	0,657	9,868	2,119	Signifikan
Kualitas efisiensi sistem (X2)	0,185	3,053	2,119	Signifikan
R	= 0,935			
R Square	= 0,873			
Adjusted R Square	= 0,859			
f Hitung	= 58,680 ,3467			
Sig F	= 0,000			
f tabel	= 3,467			

Nilai korelasi berganda ini menunjukkan pengaruh kualitas efektivitas sistem dan kualitas efisiensi sistem terhadap penerapan SIP APBD ditunjukkan dengan persamaan regresi sebagai berikut :

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2$$

$$Y = 0,661 + 0,657 X_1 + 0,185 X_2 \text{ atau}$$

$$\text{Penerapan SIP APBD} = 0,661 + 0,657 (\text{kualitas efektivitas sistem}) + 0,185 (\text{kualitas efisiensi sistem})$$

Dari persamaan tersebut dapat diterangkan sebagai berikut:

- i. Konstanta sebesar 0,661 menyatakan bahwa jika tidak ada kualitas efektivitas sistem dan kualitas efisiensi sistem maka penerapan SIP APBD adalah 0,661
- ii. Koefisien regresi jika bertanda (+) menandakan arah hubungan yang searah, sedangkan tanda (-) menunjukkan arah hubungan berbanding terbalik antara variabel bebas (X) dengan variabel terikat (Y).
- iii. Koefisien regresi kualitas efektivitas sistem sebesar 0,657 menyatakan bahwa setiap penambahan (karena tanda positif) 0,1 untuk kualitas efektivitas sistem akan meningkatkan penerapan SIP APBD 0,1. Dan sebaliknya, jika kualitas efektivitas sistem turun sebesar 0,1, maka penerapan SIP APBD juga diprediksi mengalami penurunan sebesar 0,1.
- iv. Koefisien regresi kualitas efisiensi sistem sebesar 0,185 menyatakan bahwa setiap penambahan (karena tanda positif) 0,1 untuk kualitas efisiensi sistem akan meningkatkan penerapan SIP APBD 0,1. Dan sebaliknya, jika kualitas efisiensi sistem turun sebesar 0,1, maka penerapan SIP APBD juga diprediksi mengalami penurunan sebesar 0,1.

C. Pembahasan

1. Analisa *output*

Berdasarkan hasil analisa di atas, penelitian dengan judul Analisis Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Atas Sistem Dan Prosedur Belanja Di Pemerintah Kota Blitar kemudian diperjelas pada pembahasan di bawah:

a. Level Kematangan

Dari pengujian tersebut diperoleh hasil bahwa kualitas efektivitas sistem, kualitas efisiensi sistem dan penerapan SIP APBD telah mencapai level kematangan level 4 (*managed and measurable*). Berarti tanggung jawab pengelolaan TI secara jelas telah ditentukan, dikelola dan diselenggarakan. Pemerintah dapat mengukur dan memonitor prosedur yang ada sehingga mudah ditanggulangi jika terjadi penyimpangan. Proses yang ada sudah berjalan dengan baik dan konstan. Otomasi dan perangkat teknologi informasi yang digunakan juga telah memenuhi kebutuhan.

b. Pengaruh kualitas efektivitas sistem terhadap Penerapan SIP APBD

Kualitas efektivitas sistem merupakan apa saja unsur yang terdapat di dalam sebuah kesatuan sistem yang dapat memenuhi kebutuhan para penggunaannya. Ketersediaan sistem informasi harus dirasakan manfaatnya sebagai penyedia informasi untuk bahan dalam proses pengambilan keputusan, maupun dukungan operasional sebuah organisasi. Berdasarkan hasil analisa di atas, kualitas efektivitas sistem ternyata memberikan pengaruh secara signifikan terhadap penerapan SIP APBD. Nilai t hitung dan t tabel sama-sama positif, ini menimbulkan pengaruh yang searah dimana saat variabel kualitas efektivitas meningkat maka penerapan SIP APBD juga akan meningkat, begitu pula sebaliknya, jika variabel kualitas efektivitas menurun maka penerapan SIP APBD juga akan menurun.

Di dalam variabel kualitas efektivitas sistem terdapat sembilan sub variabel yang valid, yaitu menyangkut pemisahan tugas, pejabat terlatih, kebutuhan pelaksana sesuai SK, pelatihan rutin, dokumentasi yang memadai, deteksi kehilangan data, penyajian tepat waktu dan cetak laporan.

Dalam sebuah kategori dari prosedur pengendalian sebuah sistem adalah pemisahan tugas, agar dapat tercipta pengecekan silang dalam setiap kerja dari beberapa pejabat pelaksana APBD. Maksud utama dari pemisahan tugas adalah mencegah terjadinya kesalahan dan penyimpangan dari pembebanan tanggung jawab. Kriteria atau masalah pokok dalam pemisahan tugas adalah fungsi-fungsi yang berbeda untuk pelaksana, pencatatan dan penyimpangan dari setiap transaksi. Sehingga betul-betul bisa diminimalkan resiko terjadinya penyimpangan. Di Pemerintah Kota Blitar, pemisahan tugas ini telah tertuang dalam SK Walikota dimana disana dirinci pula tugas pokok dan fungsi masing-masing pejabat pelaksana yang ditunjuk.

Bagi para pejabat pelaksana SIP APBD yang telah ditetapkan melalui SK tersebut, maka akan diberi pelatihan rutin secara berkala mengenai tata

kelola keuangan yang dalam proses pelaksanaannya menggunakan aplikasi SIP APBD ini. Kegiatan pelatihan dan sosialisasi yang bertujuan untuk menjamin kesiapan setiap sumber daya manusia yang terlibat bagus untuk diterapkan, hal tersebut akan mendukung perwujudan orang tepat berada pada tempat yang tepat sehingga SDM dalam hal ini yang terlibat dalam SIP APBD akan mengerti apa yang seharusnya dia harus mengerti dan melakukan apa yang seharusnya dia harus lakukan untuk SIP APBD, sehingga dengan para pejabat pelaksana yang terlatih dan menguasai betul bidang yang ditanganinya, maka akan semakin meningkatkan kualitas penerapan SIP APBD .

Dalam sebuah sistem informasi akuntansi yang diterapkan oleh suatu lembaga pemerintah, seluruh proses transaksi perlu dilakukan pendokumentasian yang baik. Karena dengan dokumentasi yang memadai, jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya perbedaan jumlah pengeluaran belanja yang tercatat di bendahara pengeluaran berbeda dengan yang ada di bagian petugas verifikasi, maka akan dapat dilakukan sinkronisasi berdasarkan dokumentasi yang ada. Juga ketika ada pemeriksaan dari BPK, maka jika dokumentasi yang dimiliki telah memadai, maka hasil temuan-temuan penyimpangan bisa dicek ulang melalui dokumentasi yang ada. Oleh karena itu dukungan sistem aplikasi yang betul-betul berkualitas memang sangat diperlukan untuk menghindari terjadinya kehilangan data atau tidak terdokumentasikannya proses transaksi yang berlangsung.

Kemudian dalam penyajian data informasi juga selayaknya bisa dicetak tepat waktu ketika sewaktu-waktu dibutuhkan, dengan disediakannya template untuk masing-masing prosedur, maka akan memudahkan bagi para pengguna untuk mencetak sebuah laporan insidentil, misalnya hanya membutuhkan laporan untuk satu kegiatan saja, maka kalau template yang disediakan lengkap, hanya data informasi yang diperlukan saja yang dicetak. Jika kualitas data rendah, yaitu data yang dihasilkan tidak akurat, tidak dimasukkan tepat waktu atau tidak tersedia pada saat diperlukan maka akan menghasilkan informasi yang tidak andal.

Dari beberapa kriteria yang ada diatas, satu hal yang tidak kalah pentingnya adalah apakah dalam sebuah sistem aplikasi yang digunakan, bisa menghasilkan satu laporan keuangan yang diperlukan. Apalagi prosedur belanja yang dilalui melalui beberapa tahapan dari mulai pengajuan pembayaran (SPP), SPM, pengesahan SPJ sampai pencairan dana (SP2D) dilakukan di masing-masing fungsi yang berbeda. Pada SIP APBD, aplikasi tersebut telah mampu menghasilkan laporan keuangan baik secara menyeluruh ataupun per-SKPD, tetapi masih perlu ditingkatkan lagi untuk aplikasi yang menghasilkan laporan tentang aset yang dihasilkan dari belanja modal (belanja yang wujudnya menjadi barang inventaris, bukan habis pakai), sehingga akan bisa diketahui penambahan aset pemerintah daerah dalam kurun waktu sesuai pembuatan laporan keuangan.

c. Pengaruh kualitas efisiensi sistem terhadap Penerapan SIP APBD

Kualitas efisiensi sistem maksudnya dengan sumber daya informasi tertentu dapat menghasilkan output semaksimal mungkin. Artinya dengan konfigurasi sistem seminimal mungkin tetapi dapat memenuhi kebutuhan pemakai jasa semaksimal mungkin.

Berdasarkan hasil analisa kuantitatif di sub bab sebelumnya, kualitas efisiensi sistem berpengaruh secara signifikan terhadap penerapan SIP APBD dikarenakan t hitung kualitas efisiensi sistem (3,053) lebih dari t tabel (2,119) sehingga apabila kualitas efisiensi sistem ditingkatkan maka kualitas penerapan SIP APBD akan semakin meningkat pula. Variabel kualitas efisiensi sistem di dalamnya mencakup transmisi, mengatasi masalah (*trouble shooting*), dukungan aplikasi, terpercaya (*trusted*), data up to date data.

Dukungan instalasi komputer baik berupa hardware maupun software sangatlah diperlukan. Dengan tersedianya peralatan yang memadai, akan memberi dampak yang baik pada pelaksanaan SIP APBD. Apalagi saat ini SIP APBD telah menerapkan sistem jaringan. Jaringan komputer memungkinkan operator bisa mengoperasikan sistem dengan menggunakan komputer lain yang terhubung. Sehingga ini sangat membantu apabila operator sedang berada di tempat yang jauh dari komputer yang biasa digunakannya untuk mengoperasikan sistem dan pada saat itu data keluaran dari sistem sangat

dibutuhkan dan harus segera ada untuk menentukan langkah-langkah yang terbaik bagi instansi. Sehingga apabila jaringan komputer ditingkatkan misalkan untuk kemudahan akses, SIP APBD akan semakin efisien.

Komputer adalah alat yang canggih, tetapi tanpa dikelola dengan benar menjadi tidak bermakna. Oleh karena itu salah satu resiko yang dihadapi instansi adalah justru komputer dikelola secara tidak benar. Resiko yang bersifat umum ialah apabila karena suatu hal sistem komputer tidak dapat berfungsi sehingga dapat mengakibatkan instansi tidak dapat beroperasi dengan normal, maka dapat dibayangkan apa yang akan terjadi dan berapa besar biaya yang disebabkan. Sesuatu hal yang dimaksud disini dapat berupa gangguan listrik, sistem jaringan, atau komputer itu sendiri yang rusak.

Untuk itu agar pengelolaan komputer bisa lebih fokus banyak instansi termasuk Pemerintah Kota Blitar sendiri mengadakan kerja sama dengan pihak penyedia jasa, dengan mengadakan perjanjian jasa pelayanan (*service level agreement*) yang menyangkut penyediaan aplikasi, pelatihan pemakaian software, pemeliharaan dll. Hal ini dimaksudkan agar memperlancar tugas-tugas dan jika terjadi permasalahan, lebih cepat dan mudah diatasi karena telah ditangani oleh ahli yang membidangnya.

Kemudian untuk integritas data harus terjamin sehingga informasi yang dihasilkan dapat dipercaya dan sinkron memang bagus untuk sistem, dengan banyaknya prosedur yang harus dilalui dan banyaknya pejabat yang terlibat pada proses pengajuan dana, maka akan meminimalkan resiko terjadinya kecurangan-kecurangan maupun kesalahan yang tidak disengaja. Selain itu adanya integritas informasi juga bisa dijadikan kendali dalam melakukan belanja agar tidak melebihi pagu atau plafon anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD.

- d. Pengaruh antara kualitas efektivitas sistem dan kualitas efisiensi sistem terhadap penerapan SIP APBD.

Berdasarkan hasil analisa data di subbab sebelumnya, apabila dicari pengaruh secara simultan maka variabel kualitas efektivitas sistem (X1) dan kualitas efisiensi sistem (X2) secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap penerapan SIP APBD (Y) dengan indikator f hitung sebesar 58,680 lebih dari f tabel yang bernilai 3,467 Sehingga apabila variabel kualitas efektivitas sistem dan kualitas efisiensi sistem meningkat maka akan semakin meningkat pula penerapan SIP APBD, begitu pula sebaliknya, jika kualitas efektivitas sistem dan kualitas efisiensi sistem menurun maka penerapan SIP APBD juga akan menurun .

2. Analisa Penerapan SIP APBD

a. Kualitas efektivitas sistem.

Berdasarkan hasil analisa regresi linier berganda di atas dapat disimpulkan bahwa, apabila diukur dengan menggunakan pengukuran yang didasarkan pada kualitas efektivitas sistem, maka penerapan SIP APBD hasilnya akan meningkat atau menurun tergantung dari kualitas efektivitas sistem karena efektivitas sistem memiliki pengaruh secara signifikan terhadap Penerapan SIP APBD. Oleh karena itu secara kualitas efektivitas sistem, SIP APBD akan selalu mengalami perubahan.

Indikator bahwa kualitas efektivitas sistem mempengaruhi penerapan SIP APBD di Pemerintah Kota Blitar diantaranya adalah dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerahnya telah adanya pemisahan tugas dari masing – masing pejabat pelaksana SIP APBD yang ditetapkan melalui SK Walikota. Dan sekaligus diuraikan secara rinci pula tugas pokok fungsi dari masing-masing pejabat pelaksana, sehingga tidak terjadi saling tumpang tindih dalam melaksanakan tugas yang dibebankan. Dan bagi para pejabat pelaksana SIP APBD yang telah ditetapkan melalui SK tersebut, juga telah diberi pelatihan dan sosialisasi secara berkala.

Dokumen-dokumen yang dihasilkan dari proses belanja di Pemerintah Kota Blitar diantaranya Surat penyediaan Dana (SPD), Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM) dan . Surat Perintah Penyediaan Dana (SP2D) yang dilengkapi dengan Surat Pertanggungjawaban selama ini telah terdokumentasi dengan baik. Dokumen disimpan dengan aman, hanya orang yang berwenang dapat akses ke dokumen tersebut dan telah ada

backup yang memadai terhadap dokumen tersebut. Sehingga ketika sewaktu-waktu dibutuhkan bisa disajikan dengan cepat dan tepat waktu. Juga dukungan aplikasi yang sudah menyediakan template untuk masing-masing prosedur, semakin memudahkan ketika hanya membutuhkan mencetak laporan insidentil. Dan lebih jauh lagi Sip APBD telah mampu menghasilkan laporan keuangan secara menyeluruh.

Jadi ditinjau dari tingkat kualitas efektivitas sistem yang mempunyai pengaruh secara signifikan, maka dengan semakin meningkatnya kualitas efektivitas sistem dipemerintah Kota Blitar, maka dengan sendirinya penerapan SIP APBD juga akan semakin baik pula kualitasnya.

b. Kualitas Efisiensi Sistem

Variabel pengukur penerapan SIP APBD yang terdapat pada kualitas efisiensi sistem, berdasarkan analisa kuantitatif dengan regresi linier ganda berpengaruh secara signifikan terhadap penerapan SIP APBD sehingga apabila variabel tersebut ditingkatkan maka penerapan SIP APBD juga akan semakin meningkat begitu pula bila variabel tersebut menurun maka penerapan SIP APBD akan semakin memburuk.

Hal itu ditandai dengan dukungan instalasi komputer baik berupa hardware maupun software yang memadai, dengan menerapkan sistem jaringan sehingga memungkinkan operator bisa mengoperasikan sistem dengan menggunakan komputer lain yang terhubung.

Untuk pengelolaan pengelolaan komputer agar bisa lebih fokus maka Pemerintah Kota Blitar mengadakan perjanjian jasa pelayanan (*service level agreement*) yang menyangkut penyediaan aplikasi, pelatihan pemakaian software, pemeliharaan dll. Hal ini dimaksudkan agar memperlancar tugas-tugas dan jika terjadi permasalahan, lebih cepat dan mudah diatasi karena telah ditangani oleh ahli yang membidangnya.

J. Kesimpulan

Dari pengujian melalui pendekatan COBIT diperoleh hasil bahwa kualitas efektivitas sistem, kualitas efisiensi sistem dan penerapan SIP APBD di Pemerintah Kota Blitar telah mencapai level kematangan level 4 (*managed and measurable*). Berarti tanggung jawab pengelolaan TI secara jelas telah ditentukan, dikelola dan diselenggarakan, telah memiliki prosedur baku formal yang telah disosialisasikan ke segenap jajaran pejabat pelaksana untuk dipatuhi dan dikerjakan dalam aktivitas sehari-hari. Pemerintah dapat mengukur dan memonitor prosedur yang ada sehingga mudah ditanggulangi jika terjadi penyimpangan. Proses yang ada sudah berjalan dengan baik dan konstan. Otomasi dan perangkat teknologi informasi yang digunakan juga telah memenuhi kebutuhan.

Kemudian dari Uji Simultan dengan F-Test, yaitu untuk mengetahui pengaruh variabel bebas (kualitas efektivitas sistem dan kualitas efisiensi sistem) secara bersama-sama terhadap variabel terikat (kualitas penerapan SIP APBD). maka diperoleh hasil bahwa variabel kualitas efektivitas sistem dan kualitas efisiensi sistem secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kualitas penerapan SIP APBD, dengan indikator f hitung sebesar 58,680 lebih dari f tabel yang bernilai 3,467 sehingga apabila variabel kualitas efektivitas sistem dan kualitas efisiensi sistem meningkat maka akan semakin meningkat pula kualitas penerapan SIP APBD, begitu pula sebaliknya, jika kualitas efektivitas sistem dan kualitas efisiensi sistem menurun maka kualitas penerapan SIP APBD juga akan menurun.

Dan dari Uji t (parsial) dengan T-test yang dimaksudkan untuk mengetahui besarnya pengaruh masing-masing variabel bebas secara individual (parsial) terhadap variabel terikat diperoleh hasil bahwa, t – hitung kualitas efektivitas sistem (9,868) lebih besar dari t -table 2,119 berarti apabila kualitas efektivitas sistem ditingkatkan maka kualitas penerapan SIP APBD akan semakin meningkat pula begitu pula sebaliknya, bila kualitas efektivitas sistem menurun maka kualitas penerapan SIP APBD juga akan menurun. Sedangkan t hitung kualitas efisiensi sistem (3,053) lebih besar dari t tabel (2,119) ini juga berarti apabila kualitas efisiensi sistem ditingkatkan maka kualitas penerapan SIP APBD akan semakin meningkat, bila kualitas efisiensi sistem menurun maka kualitas penerapan SIP APBD juga akan menurun pula.

Lampiran Daftar Kuesioner :

DAFTAR PERTANYAAN

Nama Dinas/ Badan :
Jabatan Responden :
Pendidikan Terakhir :

Sistem Informasi Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (SIP APBD) adalah suatu program aplikasi yang ditunjukkan untuk membantu pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerahnya. Dengan aplikasi ini, Pemerintah daerah dapat melaksanakan pengelolaan keuangan daerahnya secara terintegrasi, dimulai dari penganggaran, penatausahaan hingga akuntansi dan pelaporannya

Dalam daftar pertanyaan ini memuat beberapa pertanyaan yang bertujuan untuk melihat keamanan, efektifitas dan efisien SIP APBD melalui para pengguna laporan-laporan yang dihasilkan SIP APBD, dalam hal ini pengguna laporan-laporan yang dimaksud adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Pilih salah satu jawaban pada setiap pertanyaan di bawah ini dengan memberikan tanda centang (✓) di dalam kotak jawaban yang anda pilih.

A. Kelompok Efektifitas Sistem :

1. Apakah menurut anda ada manfaatnya pemisahan tugas/fungsi para pejabat pelaksana SIP APBD (Bendahara, Petugas Verifikasi, Pejabat Pelaksana Teknis kegiatan dll)?

☐ Tidak	☐ Mungkin	☐ Kurang
☐ Bermanfaat	☐ Sangat Bermanfaat	
2. Apakah menurut anda ada manfaatnya dengan adanya pejabat pelaksana SIP APBD yang terlatih, cakap dan dapat dipercaya,?

☐ Mungkin	☐ Mungkin	☐ Bermanfaat
☐ Sangat bermanfaat	☐ Kurang	
3. Adanya pencatatan dan dokumentasi yang memadai, apakah menurut anda SULIT diwujudkan?

☐ Mungkin	☐ Sulit	☐ Agak sulit
☐ Bisa	☐ Sangat mudah	
4. Pengontrolan antara catatan yang dihasilkan SIP APBD dengan harta secara fisik yang ada, apakah menurut anda perlu diwujudkan?

☐ Mungkin	☐ Sangat perlu	☐ Kurang
☐ Tidak	☐ Perlu	
5. Apakah sistem aplikasi mampu mencegah atau mendeteksi kehilangan data selama pemrosesan?

☐ Tidak	☐ Mungkin	☐ Kurang
☐ Baik	☐ Baik sekali	
6. Data informasi harus bisa disajikan tepat waktu dan untuk laporan insidentil telah disediakan template, apakah menurut anda SULIT untuk diwujudkan ?

☐ Sulit	☐ Mungkin	☐ Bisa
☐ Agak sulit	☐ Sangat mudah	
7. Apakah laporan aplikasi dapat dicetak kembali jika ditemukan kesalahan?

☐ Baik	☐ Baik Sekali	☐ Kurang
☐ Mungkin	☐ Tidak	

8. Apakah sistem aplikasi yang digunakan sekarang sudah memenuhi kebutuhan untuk menghasilkan laporan keuangan yang diperlukan?
- | | | |
|----------------------------------|---|--------------------------------|
| ☐ Mungkin | ☐ Dalam batas tertentu | ☐ Tidak |
| ☐ Sedikit | ☐ Bisa seluruhnya | |
9. Apakah dengan adanya para pejabat pelaksana SIP APBD yang ditunjuk melalui SK Walikota, sudah memenuhi kebutuhan untuk melaksanakan SIP APBD?
- | | | |
|--------------------------------|--|---------------------------------|
| ☐ Sudah | ☐ Mungkin | ☐ Kurang |
| ☐ Belum | ☐ Sangat memenuhi | |
10. Kegiatan pelatihan dan sosialisasi baik fungsi maupun teknis harus terjadwal secara rutin untuk menjamin kesiapan setiap SDM yang terlibat, apakah menurut anda ada manfaatnya ?
- | | | |
|-------------------------------------|--|---------------------------------|
| ☐ Tidak | ☐ Mungkin | ☐ Kurang |
| ☐ Bermanfaat | ☐ Sangat Bermanfaat | |

Kelompok Kualitas Efisiensi Sistem :

1. Apakah hardware dan software yang digunakan sekarang cukup memadai untuk mendukung transmisi atau saluran link?
- | | | |
|--------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| ☐ Tidak | ☐ Mungkin | ☐ Kurang |
| ☐ Baik | ☐ Baik Sekali | |
2. Apakah menurut anda ada manfaatnya SIP APBD yang lengkap fiturnya, sesuai dengan fungsi-fungsi pengelolaan keuangan daerah dan terintegrasi?
- | | | |
|-------------------------------------|--|---------------------------------|
| ☐ Tidak | ☐ Mungkin | ☐ Kurang |
| ☐ Bermanfaat | ☐ Sangat Bermanfaat | |
3. Apakah menurut anda ada manfaatnya bila integritas data harus terjamin sehingga setiap data keluaran dapat dipercaya (trusted data),?
- | | | |
|-------------------------------------|--|---------------------------------|
| ☐ Tidak | ☐ Mungkin | ☐ Kurang |
| ☐ Bermanfaat | ☐ Sangat Bermanfaat | |
4. Apakah menurut anda dapat diatasi dalam batas waktu yang dapat diterima apabila muncul permasalahan,?
- | | | |
|--------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| ☐ Tidak | ☐ Mungkin | ☐ Kurang |
| ☐ Bisa | ☐ Tepat waktu | |
5. Apakah menurut anda ada manfaatnya data harus up to date,?
- | | | |
|-------------------------------------|--|---------------------------------|
| ☐ Tidak | ☐ Mungkin | ☐ Kurang |
| ☐ Bermanfaat | ☐ Sangat Bermanfaat | |
6. Apakah menurut anda sulit mewujudkan untuk menyediakan dukungan teknis aplikasi?
- | | | |
|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|
| ☐ Sulit | ☐ Mungkin | ☐ Bisa |
| ☐ Agak sulit | ☐ Sangat mudah | |

B. Kelompok Kualitas Penerapan SIP APBD

1. Apakah menurut anda ada manfaatnya keamanan dan kerahasiaan data harus terjamin dengan sistem keamanan dan tata kelola pengguna sistem yang terencana dan terkontrol ?
- | | | |
|-------------------------------------|--|---------------------------------|
| ☐ Tidak | ☐ Mungkin | ☐ Kurang |
| ☐ Bermanfaat | ☐ Sangat Bermanfaat | |
2. Apakah menurut anda diperlukan penggunaan user protection dengan menggunakan password pada setiap computer?
- | | | |
|--------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|
| ☐ Perlu | ☐ Mungkin | ☐ Sangat perlu |
| ☐ Tidak | ☐ Kurang | |

3. Apakah SIP APBD dilengkapi dengan anti virus terbaru?
- | | | | | | |
|--------------------------|--------|--------------------------|-------------|--------------------------|-------|
| ☐ | Baik | ☐ | Mungkin | ☐ | Tidak |
| ☐ | Kurang | ☐ | Sangat Baik | | |
4. Apakah indikasi pelanggaran terhadap keamanan sistem dapat dideteksi dalam waktu singkat?
- | | | | | | |
|--------------------------|------------------|--------------------------|------------|--------------------------|-------|
| ☐ | Terdeteksi cepat | ☐ | Mungkin | ☐ | Tidak |
| ☐ | Kurang | ☐ | Tersedeksi | | |
5. Apakah tersedia prosedur dalam memberikan dan memutuskan hak akses user?
- | | | | | | |
|--------------------------|---------|--------------------------|---------|--------------------------|-------|
| ☐ | Lengkap | ☐ | Mungkin | ☐ | Tidak |
| ☐ | Kurang | ☐ | Ada | | |
6. Apakah tersedia Uninterruptable Power (UPS) yang mampu menstabilkan tegangan listrik?
- | | | | | | |
|--------------------------|--------|--------------------------|-------------|--------------------------|-------|
| ☐ | Baik | ☐ | Mungkin | ☐ | Tidak |
| ☐ | Kurang | ☐ | Sangat Baik | | |
7. Apakah data dapat ditambahkan, dihapus, dicopy, atau diubah dengan cara yang ilegal?
- | | | | | | |
|--------------------------|-------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|---------|
| ☐ | Tidak sama sekali | ☐ | Dalam tingkat tertentu | ☐ | Mungkin |
| ☐ | Sedikit | ☐ | Seluruhnya | | |
8. Apakah menurut anda dalam SIP APBD perlu disediakan data cadangan (back up) dalam program yang lain (Ms. Excel, Ms Word dll)?
- | | | | | | |
|--------------------------|---------|--------------------------|--------------|--------------------------|---------|
| ☐ | Tidak | ☐ | Perlu | ☐ | Mungkin |
| ☐ | Sedikit | ☐ | Sangat Perlu | | |

DAFTAR PUSTAKA

- Adrianto, Nico.** 2007. *Transparansi dan Akuntabilitas Publik melalui e-Government*, Edisi Pertama. Bayumedia
- Al Fatta, Hanif.** 2007. *Analisis dan Perancangan Sistem Informasi*, Yogyakarta : Andi Offset
- Arif, Bachtiar, dkk.** 2009. *Akuntansi Pemerintahan*, Jakarta : PT. Macanan Jaya Cemerlang
- Bodnar, George H., and Hopwood, William S.** 2001, *Accounting Information System: Eighth Editio*. New Jersey: Prentice-Hall Inc.
- Davis, Fred D., Bagozzi R. P., and Warsaw P. R.** 1989. "User Acceptance of Computer Technology: A Comparison of Two Theoretical Models", *Management Sciene*, Vol. 35, No. 8, August.
- Emmelhainz, Margareth,** 1990, *Electronic Data interchange : A Total Management Guide*, New York, Van Nostrand Reinhold
- Eugene L. Grant and Richard S. Leavenworth,** 1980. *Statistic Quality Control*, 5th ed., New York: McGraw-Hill Book Company.
- Gondodiyoto, Sanyoto.** 2007. *Audit Sistem Informasi dan Pendekatan CobIT*. Citra Wacana Media
- Gondodiyoto S, Hendarti H,** 2007 *Audit Sistem Infomasi Lanjutan*, Citra Wahana Media
- Hadi, Sutrisno.** (1994). *Statistik 2*. Yogyakarta: Penerbit Andi Offset
- Indrajit, Eko, Richardus.** 2002. *Electronic Government, Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital*. Yokyakarta: Andi.
- Jogiyanto.** 2007. *Model Kesuksesan Sistem Teknologi Informasi*. Yogyakarta: Penerbit Andi Offset
- , 2005. *Peraturan Pemerintah No. 24 Th. 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintrah*. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika
- , 2006. *Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Th. 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- , 2007. *Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Th. 2007 tentang Perubahan Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*
- Solikin, Achmad,** 2006, *Penggabungan Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah*, Vol 2, No2, November
- Sekaran, Uma.** (1992). *Research Methods for Business, A Skill Building Approach*. 2nd Edition. New York: John Wiley & Sons Inc.
- Turban, Efarim,** 1995, *Decision Support and Expert System*, New Jersey, Prentice Hall
- Thomson R. L., Higgins C. A. and Howell J. M.,** 1992. "Personal Computing: Toward A Conceptual Model of Utilization, *MIS Quarterly*.